

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Literature Review*

Dalam menambah pemahaman terkait dengan masalah yang diangkat, penulis menggunakan penelitian sebelumnya yang memiliki kajian serupa terkait UNIDO sebagai referensi pada penelitian ini. Tidak banyak literatur yang mengkaji tentang kerjasama UNIDO dengan Indonesia, terutama terkait industrialisasi yang ramah lingkungan. Namun, banyak kerjasama serupa yang telah dilakukan oleh kedua aktor, baik UNIDO maupun Indonesia, ataupun kerjasama yang telah dilakukan kedua aktor di sektor lainnya. Berikut penulis akan membahas beberapa penelitian sebelumnya yang menunjang penelitian ini, terutama dalam menjelaskan kajian yang akan dibahas oleh penulis.

Jurnal pertama yang dijadikan literatur pada penelitian ini yaitu jurnal karya Sigit Widyantoro (2017) yang berjudul **Implementasi Kerjasama Indonesia dan Jepang dalam Kebijakan *Green Industry***. Pada jurnal tersebut, Widyantoro membahas terkait kerjasama industri hijau yang dilakukan antar dua negara. Negara yang melakukan kerjasama tersebut yakni Indonesia dan Jepang yang bertujuan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Dalam penelitiannya, Widyantoro menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Konsep yang digunakan pada jurnal tersebut ialah konsep *green industry*. Menurut Widyantoro, konsep industri hijau dapat dikatakan sebagai wadah untuk menumbuhkan daya saing industri sehingga mampu menangani tantangan global.

Hubungan diplomatik yang dimiliki Indonesia dengan Jepang sudah terjalin selama lebih dari 50 tahun. Hubungan keduanya kian meningkat yang dilihat dari berbagai kerjasama yang dilakukan di berbagai sektor, khususnya di sektor pembangunan. Dalam kasus diatas, Jepang memegang posisi sebagai inisiator

Dessy Natalia, 2020

IMPLEMENTASI KERJASAMA ANTARA UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION (UNIDO) DAN INDONESIA DALAM MENINGKATKAN INDUSTRI PERIKANAN INDONESIA UNTUK MENCAPAI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TARGET 9

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

kerjasama yang berperan sebagai pemberi bantuan bagi Indonesia untuk mendapatkan teknologi, dana dan bantuan teknis. Widyantoro melihat bahwa Jepang tidak serta merta memberikan bantuan ke Indonesia. Namun, terdapat ketentuan yang harus dilakukan Indonesia. Ketentuan tersebut yaitu berbagai proyek kerjasama dilakukan dengan memperhitungkan faktor lingkungan.

Dalam penelitiannya, Widyantoro menilai bahwa kerjasama di bidang industri hijau antara Indonesia dan Jepang tidak hanya bertujuan untuk mengurangi dampak negatif industrialisasi terhadap lingkungan saja. Kerjasama ini juga diinisiasikan oleh Jepang untuk mempromosikan maupun investasi berbagai teknologi ramah lingkungan terbaru yang dimilikinya. Pada kasus ini, Indonesia diuntungkan dengan mendapatkan bantuan materi dan perbaikan lingkungannya. Sedangkan Jepang diuntungkan dari sisi penetrasi pasar di kalangan pelaku industri Indonesia.

Berdasarkan literatur yang sudah dijelaskan diatas, Widyantoro membahas kerjasama antara Indonesia dan Jepang di bidang industri hijau untuk pembangunan yang berkelanjutan. Jurnal tersebut menggunakan konsep *green industry*. Sedangkan pada penelitian ini, penulis menggunakan konsep *Inclusive and Sustainable Industrial Development (ISID)*. Selain itu, penelitian Widyantoro memiliki fokus yang luas pada pembangunan melalui industri hijau. Sementara itu, fokus penelitian ini yaitu pada peran UNIDO dalam meningkatkan industri perikanan Indonesia untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, kerjasama serupa juga pernah dilakukan oleh Indonesia dengan Malaysia dan beberapa organisasi pro lingkungan untuk menanggulangi kasus kabut asap Riau. Literatur kedua yang dijadikan referensi pada penelitian ini yaitu jurnal karya Muhammad Azan (2014) dengan judul **Kerjasama Indonesia - Malaysia dalam Menangani *Transboundary Haze Pollution* (Studi Kasus: Provinsi Riau) tahun 2008**. Jurnal tersebut membahas terkait kabut asap

Dessy Natalia, 2020

IMPLEMENTASI KERJASAMA ANTARA UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION (UNIDO) DAN INDONESIA DALAM MENINGKATKAN INDUSTRI PERIKANAN INDONESIA UNTUK MENCAPAI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TARGET 9

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Riau yang diakibatkan oleh kerusakan hutan dan menyebabkan kerugian terhadap multi sektor di Indonesia serta Malaysia dihadapi dengan serius oleh kedua negara.

Sebagai pihak yang sama-sama dirugikan, Malaysia dan Indonesia melakukan kerjasama jangka pendek dan menengah untuk menanggulangi kasus tersebut. Azan menemukan bahwa kerjasama yang dilakukan menguntungkan bagi keduanya terkait penghapusan masalah kabut asap Riau. Selain itu, kerjasama dengan organisasi pro lingkungan seperti *Greenpeace* dilakukan untuk solusi jangka panjang. Dalam kerangka kerjasama dengan organisasi pro lingkungan, kedua negara berkomitmen untuk menjalankan kebijakan yang meregulasi aktivitas agrikultur yang berkelanjutan guna menghindari kerusakan lingkungan yang lebih parah lagi.

Kedua penelitian di atas sama-sama membahas tentang kerjasama yang diinisiasikan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan serta pemberdayaan lingkungan dalam jangka panjang. Inti dari kedua penelitian di atas dapat ditemukan dalam penelitian ini, hanya saja aktor yang dikaji dalam kasus ini salah satunya merupakan aktor non negara. Selain itu, hasil yang didapat oleh aktor-aktor yang terlibat dalam kerjasama juga berbeda satu sama lain, meskipun pada intinya sama-sama menekankan solusi yang saling menguntungkan.

Jurnal ketiga yang menjadi tinjauan penulis adalah **Peran *United Nation Industrial Development Organization* (UNIDO) dalam Membantu Perkembangan Industri Manufaktur Indonesia 2010-2013** oleh Bonny Desfiando (2014). Dalam jurnal tersebut membahas terkait peran UNIDO dalam meningkatkan industri manufaktur dengan mengimplementasikan *green industry* yang berkontribusi dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. Kerjasama yang dilakukan Indonesia-UNIDO ini merupakan bagian dari *The Country Programme UNIDO-Indonesia 2009-2013*.

Studi tersebut menyatakan bahwa UNIDO sudah cukup berhasil dalam mendorong pengembangan industri termasuk di Indonesia yang terukur dalam hasil

Dessy Natalia, 2020

IMPLEMENTASI KERJASAMA ANTARA UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION (UNIDO) DAN INDONESIA DALAM MENINGKATKAN INDUSTRI PERIKANAN INDONESIA UNTUK MENCAPAI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TARGET 9

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

yang dicapai melalui kerjasama teknik. Kerjasama teknik yang dilakukan berupa seminar, bantuan peralatan, survei, kerjasama penelitian, bantuan tenaga ahli asing, *capacity building*, dan pengiriman peserta pelatihan ke luar negeri. Selain keuntungan yang dicapai Indonesia, keberhasilan UNIDO tersebut membawa *benefit* untuk UNIDO itu sendiri yaitu sebagai organisasi yang bergerak untuk mendorong dan mempromosikan industri negara berkembang, UNIDO mendapatkan citra atau kepercayaan dari negara lainnya untuk melakukan kerjasama.

Yang membedakan jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah sektor industri yang diamati yaitu sektor manufaktur dengan program yang telah disepakati antara UNIDO-Indonesia 2013. Sedangkan penelitian ini membahas sektor perikanan melalui program SMART-Fish di Indonesia. Selain itu, penelitian ini berfokus untuk pencapaian pembangunan berkelanjutan poin 9 sedangkan jurnal tersebut mengkaji lebih terkait posisi non-negara dalam peningkatan industri manufaktur Indonesia.

Studi selanjutnya yang peneliti gunakan sebagai tinjauan adalah Tesis oleh Aprillya Elshaviona (2015) yang berjudul *Village Based Economic Development Study Case: UNIDO's Pelagandong Project in Maluku (2009-2012)*. Studi ini membahas mengenai pembangunan ekonomi di Wilayah Maluku setelah terjadinya krisis ekonomi akibat konflik sosial. Akibatnya peternakan, properti, panen, barang keseharian, serta lebih dari 40.000 rumah manusia hancur. Konflik tersebut melumpuhkan kegiatan perekonomian sehingga Maluku menjadi salah satu provinsi termiskin di Indonesia.

Situasi ekonomi di Maluku dapat dikatakan meningkat, namun masih belum mencapai standar nasional. Dalam rangka revitalisasi ekonomi Maluku, Pemerintah, UNIDO, dan ILO bekerjasama untuk menjalankan proyek Pela Gandong dengan bantuan dana dari Jepang. Tujuan proyek tersebut adalah untuk mengurangi kemiskinan dan perdamaian di Desa. Proyek tersebut disepakati sesuai dengan *The Country Programme UNIDO-Indonesia 2019-2013*.

Dessy Natalia, 2020

IMPLEMENTASI KERJASAMA ANTARA UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION (UNIDO) DAN INDONESIA DALAM MENINGKATKAN INDUSTRI PERIKANAN INDONESIA UNTUK MENCAPAI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TARGET 9

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Dalam proyek tersebut, UNIDO memiliki tugas penting dalam penyediaan peralatan dan pelatihan dengan target mengembangkan mata pencaharian rakyat Maluku. Selain itu, UNIDO juga memiliki tugas untuk terus berinovasi dalam rangka untuk mempertahankan perekonomian Maluku. Inovasinya adalah mengembangkan bahan olahan asli Maluku seperti jus pala yang dilakukan mulai dari pemilihan kemasan sampai pemilihan pasar tempat penjualan. Hal tersebut mendapatkan respons positif dimana awalnya hanya memproduksi jus pala 40-50 botol/bulan menjadi 2.400 botol/bulan. Penjualan dilakukan di Maluku, Jakarta, serta ekspor ke Belanda.

Hasil yang tercipta sejalan dengan yang diharapkan proyek tersebut dan Bahri Saha selaku *National Project Officer* UNIDO INDONESIA menyatakan bahwa Proyek Pelagandong dinilai berhasil secara keseluruhan. Selain pengembangan ekonomi, manfaat yang didapat adalah pentingnya manajemen konflik untuk mencapai perdamaian. UNIDO dan ILO sendiri memiliki fokus untuk meningkatkan pendapatan yang adil di seluruh batas wilayah yang dianggap dapat memecahkan konflik.

Seperti studi tersebut, Penelitian ini juga membahas tentang program yang berdesain *Poverty Reduction* namun hal tersebut merupakan dampak dari konflik sosial. Selain itu studi tersebut berfokus pada pengembangan desa yang menekankan pada peningkatan ekonomi. Poin kerjasama UNIDO ini adalah keseimbangan antara ekonomi dan sosial dimana berpengaruh di tingkat nasional, seperti penelitian ini namun dibedakan oleh sektor yang dikembangkan.

Tabel 1. Tinjauan Penelitian

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian atau Buku	Inti Penelitian	Pembeda
1.	Sigit Widyantoro	Implementasi Kerjasama Indonesia dan Jepang dalam	Jepang memberikan bantuan luar negeri kepada Indonesia dengan timbal balik Indonesia harus mengikuti ketentuan dari	Penelitian membahas kerjasama industri hijau antara Jepang

Dessy Natalia, 2020
IMPLEMENTASI KERJASAMA ANTARA UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION (UNIDO) DAN INDONESIA DALAM MENINGKATKAN INDUSTRI PERIKANAN INDONESIA UNTUK MENCAPAI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TARGET 9
 UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional
 [www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

		Kebijakan <i>Green Industry</i> .	Jepang yaitu proyek-proyek ramah lingkungan. Kerjasama ini tidak hanya untuk mengurangi dampak negatif industrialisasi, Jepang juga mempromosikan dan berinvestasi dalam berbagai teknologi ramah lingkungan sehingga kedua negara mendapat keuntungan.	dan Indonesia yaitu negara dengan negara.
2.	Muhammad Azan	Kerjasama Indonesia-Malaysia dalam menangani <i>Transboundary Haze Pollution</i> (Studi Kasus: Provinsi Riau) tahun 2008	Malaysia dan Indonesia sama-sama dirugikan akibat kabut asap Riau sehingga melakukan kerjasama jangka pendek untuk penanganan dan kerjasama dengan <i>Greenpeace</i> untuk solusi jangka panjang. Kedua negara tersebut berkomitmen untuk menjalankan kebijakan yang mengatur aktivitas agrikultur yang berkelanjutan untuk menghindari kerusakan lingkungan yang lebih besar.	Penelitian ini membahas kerjasama jangka pendek negara dengan negara yaitu Indonesia dan Malaysia untuk mengatasi isu lingkungan dengan cara membuat regulasi aktivitas agrikultur yang berkelanjutan.
3.	Bonny Desfiando	Peran <i>United Nations Industrial Development</i>	Kerjasama yang dijalankan oleh UNIDO dan Indonesia untuk meningkatkan sektor industri	Yang membedakan adalah penelitian ini membahas

Dessy Natalia, 2020

IMPLEMENTASI KERJASAMA ANTARA UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION (UNIDO) DAN INDONESIA DALAM MENINGKATKAN INDUSTRI PERIKANAN INDONESIA UNTUK MENCAPAI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TARGET 9

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

		<p><i>Organization</i> (UNIDO) dalam Membantu Perkembangan Industri Manufaktur Indonesia 2010-2013</p>	<p>manufaktur Indonesia dengan cara kerjasama teknik. Keberhasilan kerjasama tersebut membawa keuntungan untuk UNIDO yaitu mendapatkan kepercayaan dari negara lainnya untuk melakukan kerjasama.</p>	<p>peningkatan industri manufaktur dan keberhasilan UNIDO sebagai organisasi internasional.</p>
4.	Aprillya Elshaviona	<p><i>Village Based Economic Development Study Case: UNIDO's Pelagandong Project in Maluku</i> (2009-2012).</p>	<p>Pelagandong merupakan suatu proyek yang dilakukan Pemerintah Indonesia bersama UNIDO dan ILO serta bantuan dana dari Jepang. Proyek tersebut berdesain <i>poverty reduction</i> dengan tujuan revitalisasi ekonomi desa akibat konflik sosial di wilayah Maluku dan perdamaian. Proyek tersebut fokus terhadap pemerataan pendapatan yang diyakini sebagai langkah manajemen konflik serta inovasi untuk mempertahankan mata pencaharian rakyat Maluku.</p>	<p>Studi tersebut menggunakan desain program yang sama dengan penelitian ini yaitu <i>poverty reduction</i>. Yang membedakan adalah aktivitas sektornya yaitu sektor desa sedangkan penelitian ini menggunakan sektor perikanan.</p>

Dessy Natalia, 2020

IMPLEMENTASI KERJASAMA ANTARA UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION (UNIDO) DAN INDONESIA DALAM MENINGKATKAN INDUSTRI PERIKANAN INDONESIA UNTUK MENCAPAI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TARGET 9

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran berisi teori dan konsep yang mendukung agar penelitian dapat disusun secara akademis. Menurut Kerlinger, teori merupakan pandangan sistematis dari gabungan definisi, dan konsep dari satu fenomena yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena tersebut melalui penjabaran relasi antar variabelnya (Kumar, 2011). Penelitian juga berguna untuk membuktikan validitas dari teori-teori. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Konsep ISID, Konsep Pembangunan Berkelanjutan Target no.9, dan Teori Kerjasama Internasional dalam menganalisis dan menjawab rumusan masalah.

2.2.1 Konsep *Inclusive and Sustainable Industrial Development* (ISID)

Konsep ISID atau *Inclusive and Sustainable Industrial Development* merupakan konsep pemanfaatan potensi penuh dari kontribusi industri untuk pembangunan berkelanjutan, peningkatan kualitas hidup, serta kemakmuran bersama (UNIDO, 2015). Konsep ini diadopsi oleh negara-negara anggota UNIDO pada Konferensi Umum pada bulan Desember 2013. ISID sendiri memastikan bahwa nilai industri mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam perekonomian negara sehingga dapat disimpulkan bahwa industri memiliki peran besar dalam pembangunan ekonomi. Tidak ada negara yang mencapai tingkat pembangunan ekonomi yang tinggi tanpa mengembangkan sektor industri oleh karena itu setiap negara harus merangsang sektor industri domestiknya. Industri sangat berkaitan dengan alam karena bahan baku yang akan diproduksi berasal dari alam, apabila tidak dalam pengawasan akan terjadi hilangnya keseimbangan alam dan kesenjangan sosial. Pertumbuhan ekonomi perlu didukung dengan program kerja yang ramah lingkungan sehingga isu tersebut tidak membahayakan generasi selanjutnya.

“Inklusif” dalam konsep ini diartikan sebagai pembangunan industri harus mencakup semua negara dan semua orang dengan kata lain manfaat dari industri harus dirasakan semua sektor. Istilah “berkelanjutan” disini

Dessy Natalia, 2020

IMPLEMENTASI KERJASAMA ANTARA UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION (UNIDO) DAN INDONESIA DALAM MENINGKATKAN INDUSTRI PERIKANAN INDONESIA UNTUK MENCAPAI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TARGET 9

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

menekankan usaha untuk mencapai kesejahteraan tanpa menghasilkan dampak negatif lingkungan serta penggunaan sumber daya alam yang berlebih. (UNIDO, 2015)

Konsep ISID ini dilakukan dengan empat tujuan utama. Pertama, untuk mengatasi penyebab kemiskinan. Kedua, memajukan daya saing ekonomi. Ketiga, menjaga lingkungan. Keempat, memperkuat pengetahuan dan institusi. Hal tersebut menjadi landasan yang kokoh untuk mempertahankan industri dalam negeri dan menghadapi konsekuensi yang berlaku yaitu isu lingkungan. Industri perikanan Indonesia mulai ditekan seoptimal mungkin untuk pertumbuhan ekonomi namun tetap diikuti dengan program perikanan berkelanjutan. Industri perikanan Indonesia lebih merujuk pada pemanfaatan tanpa merusak ekosistem atau rantai makanan dan juga pengurangan limbah dengan pemanfaatan limbah sebagai obat atau komoditas lainnya.

Mempromosikan konsep ISID untuk industri negara merupakan salah satu tugas UNIDO. Konsep ISID menjelaskan bahwa adanya keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan yang identik dengan sifat berkelanjutan dan konsep ini digunakan dalam pelaksanaan program SMART-Fish. Oleh karena itu, Konsep ISID digunakan untuk menganalisis bagaimana implementasi program tersebut, apakah sudah sesuai dengan salah satu tujuan dari program SMART-Fish Indonesia yaitu penerapan konsep inklusif dan berkelanjutan dalam meningkatkan industri perikanan.

2.2.2 Konsep Pembangunan Berkelanjutan no. 9 Infastruktur, Industri, dan Inovasi

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan 17 tujuan untuk memberantas kemiskinan, melindungi bumi, dan kesejahteraan masyarakat tahun 2030. Target tersebut dikeluarkan tahun 2015 dan diadopsi oleh semua anggota PBB. Dalam

Dessy Natalia, 2020

IMPLEMENTASI KERJASAMA ANTARA UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION (UNIDO) DAN INDONESIA DALAM MENINGKATKAN INDUSTRI PERIKANAN INDONESIA UNTUK MENCAPAI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TARGET 9

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

melaksanakan pembangunan, aktivitas dari satu bidang akan berdampak untuk bidang lainnya sehingga 17 target harus dilaksanakan beriringan agar dapat mencapai pembangunan yang seimbang antara sosial, ekonomi, dan lingkungan. (UNDP, 2015)

Target 9 yaitu Infrastruktur, Industri, dan Inovasi memiliki tujuan untuk membangun infrastruktur, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Sektor tersebut merupakan penggerak penting bagi pembangunan dan ekonomi (Bappenas, 2015). Target 9 yang menjadi fokus penelitian ini tercatat pada poin 9.2 *“Promote inclusive and sustainable industrialization and, by 2030, significantly raise industry's share of employment and gross domestic product, in line with national circumstances, and double its share in least developed countries”*. Industri seharusnya dilakukan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan juga PDB yang disesuaikan dengan kapabilitas yang dimiliki negara dan juga mencakup semua negara termasuk negara yang kurnag berkembang. Selain itu praktik industri dilakukan secara bersih dan ramah lingkungan dengan memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya. Dalam pelaksanaan industrialisasi kerap diperlukannya teknologi dan inovasi. Tanpa teknologi dan inovasi, industrialisasi tidak akan terjadi, dan tanpa industrialisasi, pembangunan tidak akan terjadi.

Sesuai dengan empat tujuan utama ISID, pertama untuk mengurangi kemiskinan dengan cara penyediaan lapangan kerja di sektor industri perikanan. Kedua untuk memajukan daya saing ekonomi, dengan pemanfaatan potensi secara efisien akan meningkatkan daya saing sekaligus untuk mempertahankan keberlangsungan industri perikanan. Ketiga, menjaga lingkungan, dengan terlaksananya peningkatan ekonomi dan aktivitas ramah lingkungan yang beriringan dengan penangkapan dan budidaya ikan

Dessy Natalia, 2020

IMPLEMENTASI KERJASAMA ANTARA UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION (UNIDO) DAN INDONESIA DALAM MENINGKATKAN INDUSTRI PERIKANAN INDONESIA UNTUK MENCAPAI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TARGET 9

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

berkelanjutan. Keempat, memperkuat pengetahuan dan institusi melalui pengembangan program sektor perikanan mengenai produktivitas dan inovasi.

Pembangunan berkelanjutan target 9 ini menjadi acuan untuk melakukan kegiatan dalam sektor infrastruktur, industri, dan inovasi. Target ini disusun oleh PBB dengan tujuan mengurangi kemiskinan dimana semua negara anggotanya wajib merealisasikannya dalam kegiatan domestik. Penelitian ini membahas tentang industri perikanan yang tergolong dalam pembangunan berkelanjutan target 9 sehingga konsep ini berguna untuk menganalisis bagaimana arah tujuan peningkatan industri tersebut. Apakah sudah sesuai dengan tujuan yang ditentukan seperti keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan sehubungan dengan fungsi identitas Indonesia sebagai anggota PBB yang diwajibkan untuk mengupayakan pembangunan berkelanjutan.

2.2.3 Konsep Kerjasama Internasional

Setelah perang dingin berakhir, globalisasi terus terjadi yang menyebabkan negara berusaha untuk memenuhi isu-isu baru. Beragamnya kemampuan negara membuat tidak semua negara dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Kesulitan untuk memenuhi kepentingan domestik tersebut membuat negara memilih *option* untuk mencapai kepentingan dengan kerjasama lintas negara. Kerjasama yang dilakukan oleh negara merupakan aspek terpenting dalam pencapaian kepentingan sehingga terciptanya kedamaian (Jackson & Sorensen, 2015). Dengan adanya kerjasama, memberikan keuntungan bagi negara yang bermitra, maka kebutuhan negara terpenuhi dan masyarakat akan sejahtera. Apabila semua negara melakukan dan mendapatkan hal yang sama, kedamaian dunia akan tercipta.

Kerjasama Internasional merupakan serangkaian hubungan-hubungan yang terjadi secara sukarela untuk memenuhi kepentingan aktor (Dougherty & Pfaltzgraff, 1997). Untuk mencapai kepentingan, negara membutuhkan aktor

Dessy Natalia, 2020

IMPLEMENTASI KERJASAMA ANTARA UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION (UNIDO) DAN INDONESIA DALAM MENINGKATKAN INDUSTRI PERIKANAN INDONESIA UNTUK MENCAPAI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TARGET 9

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

lain sehingga terdapatnya pilihan untuk membentuk atau bergabung dalam organisasi internasional atau komunitas internasional (Lebow & Lichbach, 2007). Aktor dalam hal ini tidak hanya berbicara tentang negara dengan negara namun non-negara. Kompleksitas global dimana terjadinya kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan menyebabkan kebutuhan untuk bekerjasama dengan aktor non-negara termasuk individu menjadi lebih besar. Menurut Lamy, pengaruh negara kurang signifikan dibandingkan keterlibatan aktor non-negara. (Lamy & Masker, 2017)

Aktor non-negara yang dimaksud adalah *Intergovernmental organization* (IGO), *Non-governmental organization* (NGO), *Multi National Corporation* (MNC), teroris, dan individu (Ambarwati & Wijatmadja, 2016). Dalam aktor non-negara tersebut, IGO merupakan satu-satunya aktor yang masih terkait dengan negara. IGO merupakan organisasi yang keanggotaannya berasal dari negara-negara dimana kegiatannya bersifat lintas negara untuk memfasilitasi komunikasi, hubungan, dan kerjasama antar pihak (Henderson, 1998). IGO dibentuk atas tujuan tertentu berdasarkan perjanjian yang telah disepakati negara anggota. Ciri umum dari IGO adalah keanggotaan umum dan tujuan khusus atau sebaliknya keanggotaan khusus dengan tujuan umum.

Dalam kerjasama yang diwadahi IGO, kepentingan aktor yang tergabung tersebut bisa mencakup peningkatan ekonomi, perlindungan keamanan, hingga mengurangi kerugian negatif. Upaya yang aktif dan maksimal sangat dibutuhkan dalam kerjasama agar tujuan dan kebijakan yang sudah disepakati dapat terpenuhi (Keohane, 1984). Oleh karena itu, negara harus melepaskan sedikit kedaulatannya kepada aktor non-negara atau memberikan kepercayaan kepada organisasi agar kerjasama dapat dilaksanakan dengan baik. Melepaskan sedikit keadulatan yang dimaksud adalah menjalankan peraturan yang telah disepakati walaupun belum tentu menjadi pilihan terbaik bagi negara tersebut. IGO tersebut menjadi wadah segala

Dessy Natalia, 2020

IMPLEMENTASI KERJASAMA ANTARA UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION (UNIDO) DAN INDONESIA DALAM MENINGKATKAN INDUSTRI PERIKANAN INDONESIA UNTUK MENCAPAI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TARGET 9

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

kepentingan negara sehingga negara harus mengikuti peraturan dimana peraturan tersebut mengatur interaksi negara agar tidak melampaui batas yang menyebabkan perpecahan.

UNIDO merupakan IGO yang memiliki keanggotaan umum dengan tujuan khusus yaitu promosi dan merangsang efektivitas industri negara. UNIDO sendiri memiliki fokus khusus untuk dalam pelaksanaan program dengan negara mitra. Kerjasama yang dilakukan oleh UNIDO dengan negara anggota disesuaikan dengan kapabilitas negaranya sehingga mempermudah negara mencapai kepentingannya. (UNIDO, 2016)

Program SMART-Fish di Indonesia merupakan refleksi dari kerjasama dibidang ekonomi dengan desain yang dikategorikan oleh UNIDO yaitu *poverty reduction*. Kerjasama tersebut berbentuk multilateral antara UNIDO-Indonesia serta pendanaan dari pemerintah Swiss melalui *State Secretariat for Economic Affairs* (SECO).

Pada studi ini, penulis berusaha untuk menganalisis kerjasama antara UNIDO dengan pemerintah Indonesia dilihat dari kepentingannya masing-masing. Kepentingan Indonesia disini adalah untuk merangsang industri perikanan yang berpengaruh kepada peningkatan ekonomi. Sedangkan kepentingan UNIDO yang merupakan badan dibawah PBB yang diberikan mandat untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan sesuai dengan visinya berdiri adalah untuk mendorong pergerakan industri negara anggotanya yang berkaitan erat dengan pembangunan berkelanjutan target 9 sehingga memperoleh kepercayaan dari negara-negara lainnya. Teori kerjasama ini digunakan untuk menganalisis dinamika hubungan antara UNIDO dan Indonesia yang dilakukan untuk mencapai kepentingan masing-masing yang direalisasikan melalui kerjasama lintas negara.

Dessy Natalia, 2020

IMPLEMENTASI KERJASAMA ANTARA UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION (UNIDO) DAN INDONESIA DALAM MENINGKATKAN INDUSTRI PERIKANAN INDONESIA UNTUK MENCAPAI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TARGET 9

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

2.2.4 Teori Implementasi Kebijakan

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, kebijakan menjadi salah satu usaha untuk mencapainya. Thomas R. Dye menyatakan sebuah kebijakan merupakan “*anything a government choose to do or not to do*” (Dye, 1972 : 305). Pemerintah sendiri membuat kebijakan atau aturan untuk melakukan atau melarang sesuatu sebagai usaha mengungkapkan suatu keadaan yang diinginkan dan serangkaian tujuan secara umum. Hal tersebut dapat menjelaskan bahwa kebijakan merupakan intervensi pemerintah dalam bentuk aturan dalam lingkup kegiatan public untuk mewujudkan tujuan tertentu. Menurut Colebatch (1998), proses kebijakan mencerminkan suatu proses mulai dari keputusan kebijakan, implementasi, dan penilaian kinerja.

Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier dalam buku Solichin Abdul Wahab(2008) menyatakan bahwa implementasi dari suatu kebijakan dapat dilaksanakan apabila sasaran dan tujuannya sudah dirancang dan ditetapkan karena pada dasarnya proses implementasi tersebut merupakan wujud nyata dari sebuah kebijakan. Menambah pendapat Mazmanian dan Sabatier, Grindle menyatakan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila sasaran dan tujuan telah ditetapkan, program kerja telah tersusun dan dana telah siap untuk disalurkan sesuai dengan sasaran (Grindle, 1980). Kebijakan sendiri memiliki karakter praktik langsung dalam bentuk program-program dengan waktu tertentu. Praktik dari program disesuaikan dengan kebutuhan publik sehingga publik melaksanakan serta menerima manfaat (*outcomes*) dari praktik tersebut.

Karena dibentuk berdasarkan tujuan, kesuksesan dari implementasi kebijakan ditentukan dari tercapai atau tidaknya keinginan dari kebijakan tersebut. Grindle juga menyebutkan beberapa variabel yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan implementasi dari suatu kebijakan antara lain substansi kebijakan dan cakupan dari implementasi kebijakan tersebut (Grindle,

Dessy Natalia, 2020

IMPLEMENTASI KERJASAMA ANTARA UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION (UNIDO) DAN INDONESIA DALAM MENINGKATKAN INDUSTRI PERIKANAN INDONESIA UNTUK MENCAPAI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TARGET 9

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

1980). Tahap implementasi kebijakan sendiri disesuaikan dengan tahap pembuatan kebijakan. Menurut Samodra Wibawa pembuatan kebijakan melalui proses yaitu *bottom-up* dan *top-down*, *bottom-up* yang dimaksud adalah kebijakan dihasilkan dari aspirasi atau tuntutan masyarakat sedangkan *top-down* yaitu penurunan kebijakan yang abstrak menjadi tindakan konkrit (Wibawa, 1994).

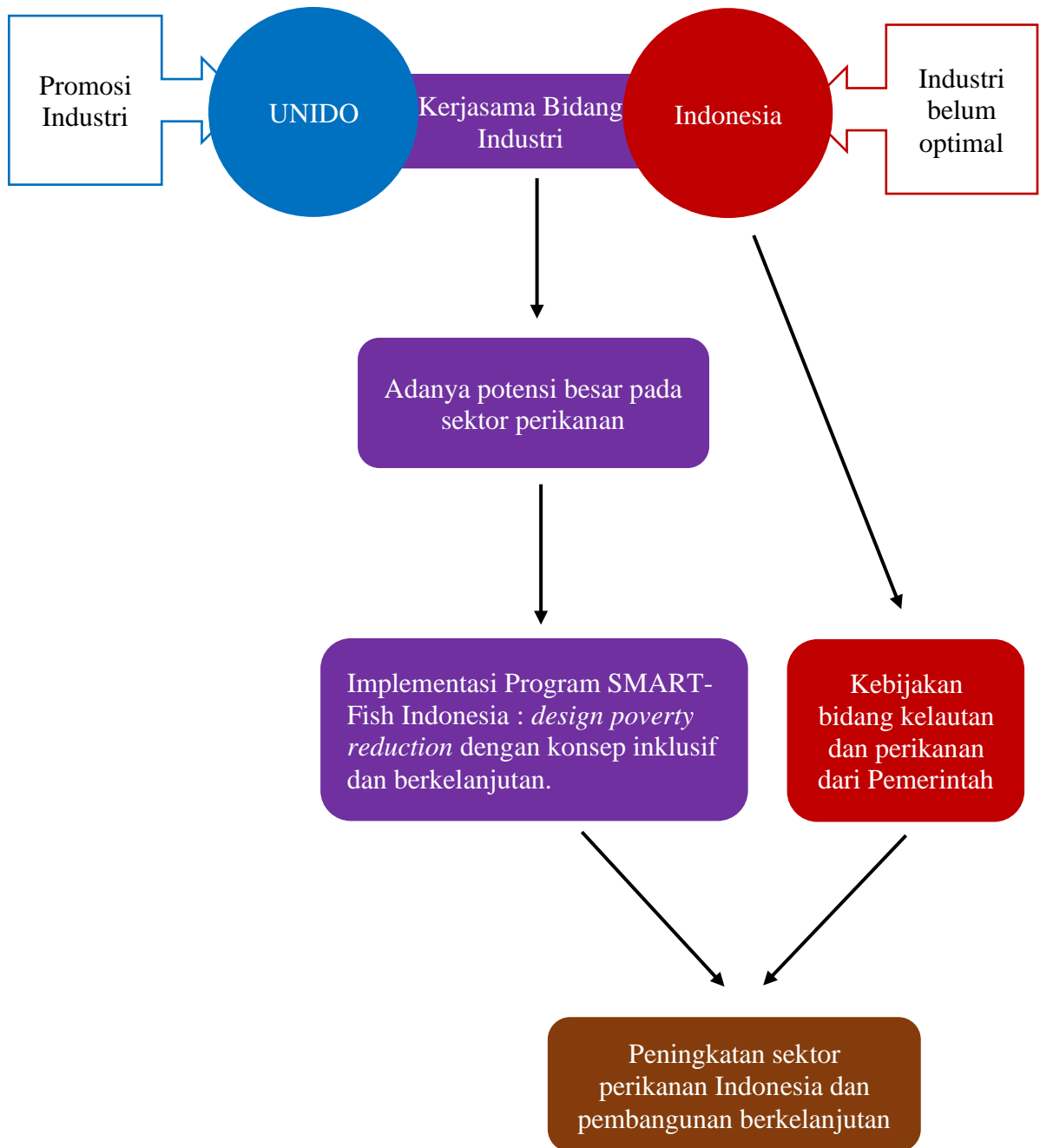
Pada hakikatnya, implementasi kebijakan merupakan bagian dari kebijakan publik tetapi akibat globalisasi, semakin banyak aktor hubungan internasional yang mengambil bagian dalam proses pelaksanaan kebijakan dalam negeri. Ketidakmampuan negara untuk menyediakan kebutuhan atau mencapai keadaan yang ditargetkan merupakan alasan kemungkinan kerjasama internasional dilakukan. Dalam penelitian ini, teori implementasi kebijakan menjelaskan bagaimana aktor Hubungan Internasional dalam hal ini adalah IGO yang ikut serta bersama pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan untuk meningkatkan industri perikanan Indonesia melalui praktik program SMART-Fish. UNIDO bersama dengan KKP mencoba untuk membentuk suatu rancangan program SMART-Fish mulai dari tujuan, sasaran, dan SOP dengan baik sehingga masyarakat dapat merasakan *outcomes* yang sesuai dengan harapan keduanya yaitu peningkatan dan efisiensi proses industri sektor perikanan.

Dessy Natalia, 2020

IMPLEMENTASI KERJASAMA ANTARA UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION (UNIDO) DAN INDONESIA DALAM MENINGKATKAN INDUSTRI PERIKANAN INDONESIA UNTUK MENCAPAI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TARGET 9

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

2.3 Alur Pemikiran



Dessy Natalia, 2020

IMPLEMENTASI KERJASAMA ANTARA UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION (UNIDO) DAN INDONESIA DALAM MENINGKATKAN INDUSTRI PERIKANAN INDONESIA UNTUK MENCAPAI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TARGET 9

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

2.4 Asumsi Dasar

UNIDO berupaya mempromosikan industri yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan mandat PBB untuk meningkatkan perekonomian dengan tujuan mengurangi kemiskinan. Sektor yang menjadi tujuannya adalah sektor perikanan karena dianggap memiliki potensi yang tinggi didukung oleh letak geografis dan bentuk negara Indonesia yang memiliki laut yang sangat besar dan kaya akan sumber daya. Namun, pengelolaan tersebut masih kurang optimal dan sia-sia apabila diabaikan. Konsep ISID yang direfleksikan melalui program SMART-Fish di Indonesia dan diikuti dukungan pemerintah memberikan dampak positif tersendiri bagi sektor perikanan. Program SMART-Fish memberikan standar khusus untuk produk sehingga tidak hanya untuk meningkatkan kuantitas perdagangan ikan Indonesia tetapi juga mempertahankan kualitas sehingga ikan Indonesia meramaikan pasar global diiringi dengan pelaksanaan industri yang berkelanjutan.

Dessy Natalia, 2020

IMPLEMENTASI KERJASAMA ANTARA UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION (UNIDO) DAN INDONESIA DALAM MENINGKATKAN INDUSTRI PERIKANAN INDONESIA UNTUK MENCAPAI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TARGET 9

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]